

---

---

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN BERDASARKAN KONSEP  
VALUE FOR MONEY**

**M. Ramadhany Sita, Yeni Widyanti**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora  
Universitas Bina Darma Palembang  
181520105@student.binadarma.ac.id  
Jl. A. Yani No. 3, Palembang 30624, Indonesia

***Abstract***

*Performance measurement is needed as an effort to increase the achievement of successful public services in the future. Measuring financial performance in government organizations can be assessed using Value for Money which has three concepts in developing a performance indicator that can measure the level of economic ratios, efficiency, and effectiveness. The aim is to analyze financial performance measurements using the value-for-money method in South Sumatra Province for the 2017 - 2020 period and determine economic growth versus poverty in South Sumatra Province. Value for Money is a management concept for public sector organizations that is based on three main elements, namely economy, efficiency, and effectiveness. From the results of research that has been carried out, each ratio in the Value for Money framework is considered positive. However, when considering calculations related to theory, the financial performance of the Regional Government of South Sumatra Province experiences variations. The performance assessment of the regional government of South Sumatra Province using the Value for Money Concept has shown satisfactory results. One of the measurement indicators, such as the economic ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio, are all in the good category according to the economic, efficient, and effective characteristics represented by the ratio calculation.*

**Keywords:** *Performance Measurement, Value For Money, Economy, Efficiency, Effectiveness*

**Abstrak**

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian keberhasilan pelayanan *public* di masa mendatang. Pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintah dapat dinilai dengan *Value for Money* yang memiliki tiga konsep dalam mengembangkan suatu indikator kinerja yang dapat mengukur tingkat rasio ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Tujuannya yaitu untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017 – 2020 dan mengetahui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi

Sumatera Selatan. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, setiap rasio dalam kerangka *Value for Money* dinilai positif. Namun, bila mempertimbangkan kalkulasi yang terkait dengan teori, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami variasi. Penilaian kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Konsep *Value for Money* telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu indikator pengukuran, seperti rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, semuanya berada dalam kategori yang baik sesuai dengan sifat ekonomis, efisien, dan efektif yang direpresentasikan oleh perhitungan rasio.

**Kata Kunci** : Pengukuran Kinerja, Value For Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

## 1. PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian keberhasilan pelayanan *public* di masa mendatang. Penilaian akuntabilitas kinerja keuangan suatu organisasi pemerintah dapat menggunakan analisis pencapaian target serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintah dapat dinilai dengan *Value for Money* yang memiliki tiga konsep dalam mengembangkan suatu indikator kinerja yang dapat mengukur tingkat rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian untuk output yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) atas sumber yang dipercaya. Sehingga pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya apakah berhasil atau tidak. Akuntabilitas sektor publik juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Governance*.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Muhammad Ubaidillah (2019), hasil dari penelitian menyatakan dari segi rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di tahun 2014- 2022 berada pada kriteria ekonomis yakni sebesar 93,26%. Dari segi rasio efisien pada tahun 2014-2017, memiliki rata-rata rasio efisien mencapai 99,76% dapat disimpulkan sangat efisien. Serta dari segi rasio efektivitas pada tahun 2014-2017 kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dinyatakan tidak efektif, karena hanya mencapai 97,99%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kriteria efektivitas itu sendiri yang harus lebih dari 100% baru dikatakan efektif.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah tahapan evaluasi tentang taraf peningkatan atas pencapaian pelaksanaan suatu program Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “**Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Konsep Value For Money**”

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang akan dibuktikan secara objektif.

Pengertian objek penelitian menurut sugiyono (2017) adalah: Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diletakan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

### **2.2 Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2018), sasaran dari sistem evaluasi prestasi adalah:

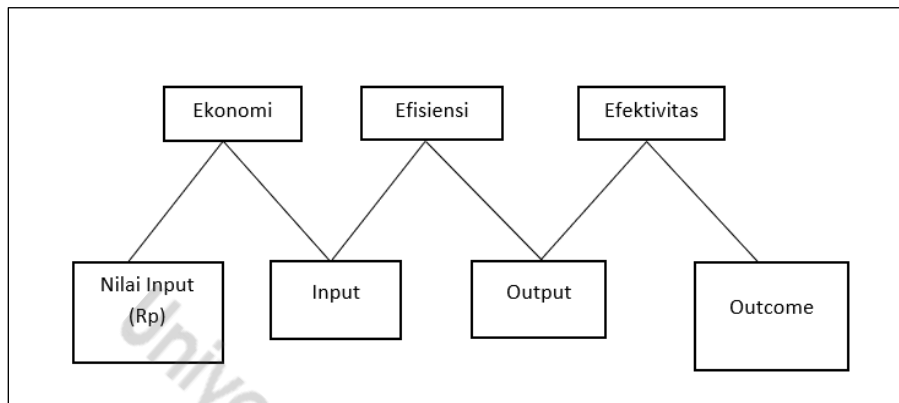
1. Guna meningkatkan komunikasi strategis dengan lebih efektif (dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas).
2. Agar dapat mengukur kinerja secara seimbang antara aspek keuangan dan non-keuangan, sehingga perkembangan pencapaian strategi bisa terlacak.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan dari manajer di tingkat menengah dan bawah, serta memberikan motivasi untuk mencapai keselarasan tujuan.
4. Sebagai sarana untuk mencapai tingkat kepuasan melalui pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### 2.3 Pengertian *Value For Money*

Dalam konteks Sektor Publik, sering kali dianggap sebagai tempat di mana terjadi masalah ketidakefisienan, pemborosan sumber daya, bocornya dana, dan sebagai lembaga yang secara konsisten mengalami kerugian finansial. Untuk mengatasi isu ini, telah muncul tuntutan baru agar organisasi di sektor publik lebih berfokus pada prinsip "value for money" saat melaksanakan berbagai aktivitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo pada tahun 2018, konsep "value for money" mencerminkan strategi manajemen yang mendasarkan diri pada tiga unsur pokok, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam hal ekonomi, perhatian difokuskan pada akuisisi input dengan kualitas dan jumlah yang ditentukan, namun dengan biaya yang paling rendah. Konsep ekonomi ini melibatkan perbandingan antara nilai input dengan nilai output yang diukur dalam mata uang tertentu. Dalam konteks ini, poin penting adalah sejauh mana organisasi sektor publik mampu mengurangi penggunaan sumber daya, dengan menghindari pengeluaran yang sia-sia dan tidak memberikan hasil yang produktif. Efisiensi melibatkan capaian hasil maksimal dengan input yang ditetapkan, atau dengan kata lain, pemanfaatan input seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan, dengan mengacu pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil program mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target yang diinginkan.

### 2.4 Pengukuran *Value For Money*

*Value for Money* menurut Mardiasmo (2018) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara skema, *Value for Money* dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Konsep *Value For Money*

## 2.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan atau peneliti (Sugiyono, 2018). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekap laporan realisasi anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja.

## 2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah teratur dalam menyelidiki serta menyusun data yang berasal dari catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumen yang terkumpul selama di lapangan. Ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, kemudian menggambarkannya dalam bagian-bagian yang relevan, merangkumnya, menyusunnya menjadi suatu model, mengidentifikasi elemen yang signifikan untuk diinvestigasi, dan akhirnya menyimpulkannya untuk memudahkan pemahaman oleh diri sendiri serta orang lain. (Hardani, 2020)

Berikut adalah rasio-rasio yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja menggunakan prinsip value for money yang dirumuskan dalam bidang keuangan oleh Mardiasmo (2018):

## 1. Ekonomi

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa ekonomi melibatkan interaksi antara pasar dan biaya masukan (cost of input). Dalam kata lain, ekonomi mewakili tindakan membeli barang dan jasa input dengan kualitas yang telah ditentukan pada harga terbaik yang dapat dicapai (menghemat pengeluaran). Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran ekonomi hanya memperhitungkan penggunaan masukan. Konsep ekonomi adalah relatif. Dengan demikian, konsep ekonomi dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Gambar 2.2** Rasio Ekonomis

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996,

Standar ekonomis menurut Mahsun (2016) dapat diketahui ekonomis atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti ekonomis berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak ekonomis.

## 2. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019), Efisiensi melibatkan perbandingan antara hasil keluaran (output) dengan sumber daya yang dimasukkan (input), atau dengan istilah lain, rasio keluaran per unit input. Sebuah entitas seperti organisasi, program, atau kegiatan dianggap efisien jika mampu menghasilkan keluaran tertentu dengan menggunakan input seefisien mungkin, atau dengan menggunakan input yang spesifik menghasilkan keluaran seoptimal mungkin (mengeluar dengan baik).

Mardiasmo (2009), Efisiensi diukur dengan membandingkan rasio keluaran dengan input. Semakin besar keluaran dibandingkan dengan input, semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi tersebut. Oleh karena itu, konsep efisiensi dapat diartikan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

**Gambar 2.3** Rasio Efisiensi

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996,

Standar efisiensi menurut Mahsun (2016) dapat diketahui efisiensi atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

### 3. Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019), Efektivitas adalah keterhubungan antara keluaran (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar sumbangan keluaran terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif pula organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Jika ekonomi menitikberatkan pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas fokus pada hasil (outcome). Sebuah entitas seperti organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif ketika keluaran yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang diinginkan, atau dalam kata lain, berpengeluaran dengan bijak.

Perspektif Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang telah diantisipasi dan hasil yang sebenarnya tercapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Gambar 2.4** Rasio Efektifitas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996,

Standar efektivitas menurut Mahsun (2016) dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN****3.1 Pengukuran *Value For Money***

Pengukuran Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Prinsip Value for Money, dengan rincian sebagai berikut:

**3.1.1 Rasio Ekonomi**

Rasio Ekonomis adalah perbandingan antara biaya aktual yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan daerah dengan anggaran biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan Pendapatan Daerah, dan perhitungannya dapat dilakukan melalui formula sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Rasio Ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Kriteria
2017	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	89,89%	Ekonomis
2018	7.426.770.057.057,95	6.763.760.533.371,09	91,07%	Ekonomis
2019	7.074.829.339.229,22	6.422.760.771.550,39	90,78%	Ekonomis
2020	7.901.928.827.814,38	6.900.475.143.744,16	87,32%	Ekonomis
2021	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,40	88,17%	Ekonomis
2022	10.426.397.636.784,00	9.663.575.726.750,69	92,68%	Ekonomis



### 3.1.2 Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk menggambarkan perbandingan antara Realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 3.2** Rasio Efisien Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisien	Kriteria
2017	6.439.523.470.869,00	8.195.968.131.799,96	70,62%	Efisien
2018	7.426.770.057.057,95	9.141.371.395.099,79	73,99%	Efisien
2019	7.074.829.339.229,22	9.280.742.072.448,62	69,20%	Efisien
2020	7.901.928.827.814,38	9.278.520.060.062,03	74,37%	Efisien
2021	10.060.730.260.979,40	9.611.291.244.667,17	104%	Tidak Efisien
2022	9.663.575.726.750,69	10.036.955.961.132,70	95,98%	Kurang Efisien

Pada tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dilihat dari kriteria efisiensi adalah tidak mengalami perubahan kriteria rasio. Pada tahun 2017 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Anggaran Belanja Daerah sebesar 6.439.523.470.869,00 dan realisasi Pendapatan daerah sebesar 8.195.968.131.799,96 dengan persentase rasio efisiensi 70,62% , hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada di 60-80%. Pada tahun 2018 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Anggaran Belanja Daerah sebesar 7.426.770.057.057,95 dan realisasi Pendapatan daerah sebesar 9.141.371.395.099,79 dengan persentase rasio efisiensi 73,99% , hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada di 60-80%. Pada tahun 2019 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Anggaran Belanja Daerah sebesar 7.074.829.339.229,22 dan

realisasi Pendapatan daerah 9.280.742.072.448,62 dengan persentase rasio efisiensi 69,20% , hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada di 60-80%, Pada tahun 2020 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Anggaran Belanja Daerah Sebesar 7.901.928.827.814,38 dan realisasi Pendapatan daerah 9.278.520.060.062,03 dengan persentase rasio efisiensi 74,37% , hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada di 60-80%, Pada tahun 2021 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Anggaran Belanja Daerah Sebesar 10.060.730.260.979,40 dan realisasi Pendapatan daerah 9.278.520.060.062,03 dengan persentase rasio efisiensi 104% , hal ini tergolong Tidak efisien karena persentasenya berada di atas 100% dan Pada tahun 2022 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Anggaran Belanja Daerah Sebesar 9.663.575.726.750,69 dan realisasi Pendapatan daerah 10.036.955.961.132,70 dengan persentase rasio efisiensi 95,98% , hal ini tergolong Kurang efisien karena persentasenya berada di antara 90-100%

### 3.1.3 Rasio Efektifitas

Pengukuran efektivitas di lakukan untuk menggambarkan perbandingan antara Realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Rasio efisiensi di rumuskan sebagai berikut :

**Tabel 4.9** Rasio Efektifitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efevektifitas	Kriteria
2017	8.195.968.131.799,96	8.911.476.779.409,71	91,97%	Efektif
2018	9.141.371.395.099,79	9.196.477.924.456,14	99,40%	Efektif
2019	9.280.742.072.448,62	9.849.942.842.746,55	94,22%	Efektif
2020	9.278.520.060.062,03	9.924.882.093.098,75	93,48%	Efektif
2021	9.611.291.244.667,17	10.800.944.019.387,00	88,98%	Cukup Efektif
2022	10.036.955.961.132,70	10.634.451.400.140,00	94,38%	Efektif

Pada tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 di lihat dari kriteria efektifitas adalah tidak mengalami perubahan kriteria rasio. Pada tahun 2017 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 8.195.968.131.799,96 dan anggaran Pendapatan daerah sebesar 8.911.476.779.409,71 dengan persentase rasio efektifitas 91,97% , hal ini tergolong efektif karena persentasenya berada di 90-100%. Pada tahun 2018 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 9.141.371.395.099,79 dan anggaran Pendapatan daerah sebesar 9.196.477.924.456,14 dengan persentase rasio efektifitas 99,40% , hal ini tergolong efektif karena persentasenya berada di 90-100%. Pada tahun 2019 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 9.280.742.072.448,62 dan anggaran Pendapatan daerah sebesar 9.196.477.924.456,14 dengan persentase rasio efektifitas 99,40% , hal ini tergolong efektif karena persentasenya berada di 90-100%, Pada tahun 2020 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 9.278.520.060.062,03 dan anggaran Pendapatan daerah sebesar 9.924.882.093.098,75 dengan persentase rasio efektifitas 93,48% , hal ini tergolong efektif karena persentasenya berada di 90-100%, Pada tahun 2021 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 9.611.291.244.667,17 dan anggaran Pendapatan daerah sebesar 10.800.944.019.387,00 dengan persentase rasio efektifitas 88,98% , hal ini tergolong Kurang efektif karena persentasenya berada di 80-90% dan Pada tahun 2022 Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 10.036.955.961.132,70 dan anggaran Pendapatan daerah sebesar 10.634.451.400.140,00 dengan persentase rasio efektifitas 94,38% , hal ini tergolong Kurang efektif karena persentasenya berada di 90-100%.

### 3.2 Penjelasan Pengukuran Kinerja dalam Konsep *Value For Money*

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, setiap rasio dalam kerangka *Value for Money* dinilai positif. Namun, bila mempertimbangkan kalkulasi yang terkait dengan teori, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami variasi. Rasio ekonomis meningkat, meskipun sesuai dengan pandangan Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti, dan Hamdani, semakin rendah rasio ekonomis maka kinerja keuangan daerah cenderung lebih baik. Rasio efisiensi juga menunjukkan peningkatan, namun berbeda dengan pandangan teori Mardiasmo yang berpendapat bahwa semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan daerah.

Sebaliknya, rasio efektivitas mengalami peningkatan sesuai Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti, dan Hamdani, bahwa semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja keuangan daerah semakin unggul. Meskipun demikian, capaian Pendapatan Daerah yang terealisasi tidak pernah mencapai target yang telah dianggarkan, bahkan tidak pernah melampaui target yang ditetapkan.

### 3.3 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Sejak awal tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar, provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi positif untuk kedua kalinya hingga Triwulan III Tahun 2021. Pada Triwulan III 2021, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 3,93% (dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya), yang merupakan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2020, di mana ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar -1,43%. Pertumbuhan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mencapai pertumbuhan positif sebesar 3,51%.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Konsep *Value for Money* telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu indikator pengukuran, seperti rasio ekonomis berada dalam kategori yang baik sesuai dengan sifat ekonomis, rasio efisien pada tahun 2021 tidak efisien dan 2022 kurang efisien dan rasio efektif pada tahun 2021 kurang efektif yang direpresentasikan oleh perhitungan rasio. Namun, terdapat beberapa faktor yang berdampak signifikan pada evaluasi kinerja, terutama dalam konteks realisasi belanja dan pendapatan yang berskala besar.
2. Evaluasi kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Konsep *Value for Money* melibatkan aspek-aspek penting seperti penyusunan APBD tahun berikutnya, kemajuan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, serta analisis sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Metode ini membantu mengukur efisiensi dan efektivitas dari tindakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran dan sumber daya secara bijak.
3. Dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, masalah kemiskinan tidak hanya terbatas pada menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Ada juga faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Referensi**

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Edison, Emron., dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.
- L. Mathis, Robert & H. Jackson, John. 2011. *Human Resource Management (edisi 10)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STM YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Prasetyo, Bambang dan Lina M.J. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prawirosoentono, Suyadi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Yuniarti, Dwi., Erlin Suprianto. 2014. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Direktorat Operasi / Produksi PT. X. INDENT. 4 (1)*, 1 Februari 2014.